

BAB II

PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM POIN- II SDGS

Dalam BAB ini akan membahas mengenai penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam poin II SDGs. Penulis akan menjelaskan bagaimana SDGs sebagai pilar juga pedoman bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan, gambaran SDGs poin II tanpa kelaparan sebagai salah satu rangkaian pencegahan stunting di Indonesia. Selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai fenomena stunting di Kabupaten Lamongan. Serta, gambaran tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan stunting.

2.1 Penerapan Sustainable Development Goals di Indonesia

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh negara berkembang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih lestari. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau *Sustainable Development Goals* merupakan serangkaian 17 tujuan global yang diadopsi oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030 pada Pembangunan Berkelanjutan di New York yang tepat pada tanggal 25 September 2015. SDGs ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. SDGs merupakan agenda pembangunan skala global yang berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera dan damai dengan tetap menjaga kelestarian planet Bumi. SDGs

disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.²⁹

SDGs dapat terbentuk dan ada karena keinginan para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan global seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan. SDGs sendiri adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati negara-negara anggota pada 2015, SDGs menggantikan tujuan Pembangunan *Milenium Development Goals* (MDGs) yang telah dilaksanakan dari tahun 2000 hingga tahun 2015. SDGs memiliki cakupan yang tentunya jauh lebih luas dan ambisius dibandingkan dengan yang ada pada MDGs, SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global yang saling terkait, seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Berbeda dari MDGs (*Millenium Development Goals*), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan. SDGs dicanangkan oleh negara-negara anggota PBB sebagai gerakan bersama untuk memastikan semua orang hidup lebih baik pada semua kalangan usia.³⁰

²⁹ I Gede Iwan Sudipa, *TEKNOLOGI INFORMASI & SDGs (Peranan Teknologi Informasi Di Berbagai Bidang Dalam Mendukung Sustainable Development Goals)*, 2023. (29/02/24,07:05 WIB)

³⁰ Dhani Hady Pratama and Farahdiba Rachma Bachtiar, "Peran Global Fund Dalam Konteks Keamanan Manusia Di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Penyakit Tuberkulosis," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 2, no. 2 (2022): 112–31, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v2i2.22638>.

SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk membantu mengatasi kemiskinan, melindungi bumi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama 15 tahun ke depan di Indonesia, program SDGs adalah lanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*), MDGs adalah agenda pembangunan global yang berkelanjutan, tetapi tidak terlalu luas dan inklusif seperti SDGs. SDGs menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia, yang meliputi perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan,³¹ perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berubah menjadi SDGs (*Sustainable Development Goals*) karena adanya perubahan situasi dunia pasca 2015 yang menuntut pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif. Berbeda dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang. SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan mencakup isu-isu yang semakin krusial, seperti deflasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, keamanan pangan, dan energi. SDGs dihadirkan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan tersebut serta bertujuan untuk memenuhi tantangan masa depan dunia dengan fokus pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

MDGs diperkenalkan pada tahun 2000 dengan batas waktu 15 tahun, sedangkan SDGs diperkenalkan pada tahun 2015 dengan batas waktu hingga 2030. MDGs

³¹ Imam Mahmudi and Muhammadiyah Ulil Absor, "STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT GUNA REALISASI AGENDA SDGs DAN MENINGKATKAN CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 802–12, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630>.

mencakup 8 tujuan, sedangkan SDGs mencakup 17 tujuan yang lebih luas termasuk kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. SDGs menekankan partisipasi aktif dari semua negara dan pemangku kepentingan juga masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuannya, sementara MDGs lebih berfokus pada peran negara dan organisasi internasional.³² MDGs bersifat "top-down" dengan bantuan dari negara maju kepada negara berkembang, sedangkan SDGs mempromosikan pendekatan inklusif dan partisipatif. Perubahan dari MDGs ke SDGs hal tersebut merupakan evolusi dalam agenda pembangunan global untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bagi semua penduduk dunia dengan masyarakat memiliki peran yang penting untuk memperluas cakupan isu-isu pembangunan yang lebih kompleks dan mendesak.³³

Indonesia ikut serta di dalam program SDGs karena Indonesia adalah anggota yang termasuk bagian dari PBB sebagai anggota PBB, Indonesia terikat untuk mendukung dan harus melaksanakan program-program PBB termasuk SDGs. Untuk mencapai kesadaran global mengenai pembangunan berkelanjutan Indonesia harus memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ingin berkontribusi pada upaya global untuk mencapai tujuan tersebut, SDGs memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, utamanya pada poin ke-2 Sebagai bagian dari anggota PBB

³² Perigrinus H. Sebong Oleh Yodi Mahendradhata, Riris Andono Ahmad, Lutfan Lazuardi, Nandyan N. Wilastonegoro, Fransiska Meyanti, *Kesehatan Global*, 2021, https://books.google.co.id/books?id=_bRIEAAAQBAJ&lpg=PA4&ots=RJx5wSZgN2&dq=sementara MDGs lebih berfokus pada peran negara dan organisasi internasional.&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false.

³³ Mochamad Riyanto and Vitalina Kovalenko, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 374–88, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>.

Indonesia berkomitmen untuk menerapkan SDGs dan mencapai target-target yang ditetapkan dalam deklarasi upaya pemerintah untuk pencegahan stunting. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan SDGs dan mencapai target-target yang ditetapkan dalam deklarasi.³⁴

Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas didirikan pada tahun 1960, berperan sebagai lembaga perencanaan nasional yang merumuskan dan menilai rencana pembangunan Indonesia. Untuk mencapai SDGs, Bappenas mengembangkan strategi nasional yang meliputi pengembangan teknologi, peningkatan kesadaran publik, dan pengembangan infrastruktur. Sebagai koordinator dan fasilitator, Bappenas meningkatkan sinergi dan efisiensi antar lembaga terkait dalam implementasi SDGs, serta mengawasi dan memantau progres pencapaian target-target SDGs dengan pengumpulan dan analisis data. Melalui peran ini, Bappenas menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mencapai SDGs. sebagai otoritas utama dalam koordinasi dan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara efektif melalui pendekatan terpadu dalam konteks SDGs.³⁵

³⁴ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2023): 153, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

³⁵ Nurmasari Situmeang, Sindy Yulia Putri, and Arman, "Strategi Percepatan Penurunan Stuntingdi Kabupaten Sigi," *Jurnal PIR : Power in International Relations* 5, no. 2 (2021): 163–74.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi stunting, yang merupakan masalah utama di negara ini, yang sejalan dengan SDGs khususnya pada Tujuan ke 2. Penerapan kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030 stunting merupakan isu penting yang terkait dengan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu sebagai salah-satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, upaya pencegahan stunting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan, seperti implementasi program 1-10-100, dan Gelang Penting (Gerakan Lamongan Peduli Stunting). MDGs dan SDGs adalah instrument yang memiliki peranan penting dalam upaya global untuk memberikan peningkatan kualitas kehidupan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua orang di seluruh dunia.³⁶

Stunting adalah masalah kesehatan dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak serta tumbuh kembang bayi selama seribu hari pertama kehidupan mereka. Karena itu, stunting harus dicegah di seluruh dunia utamanya di Indonesia karena stunting mengakibatkan gangguan pada potensi sumber daya manusia. Indonesia sendiri menduduki angka tertinggi pada kasus ini. Stunting dapat mengganggu sumber daya manusia, tingkat kesehatan, dan bahkan kematian anak. Stunting juga dapat membuat anak lebih rentan terhadap penyakit tidak

³⁶ Ahkamil Hakim, Nur Ahmadi Bi Rahmani, and Rahmat Daim Harahap, "Peran Pemeritah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Danau Toba," *Jesya* 7, no. 1 (2024): 419–33, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1434>.

menular saat dewasa, seperti obesitas, penyakit jantung, dan hipertensi, serta kesulitan dalam belajar, imunitas yang lebih rendah, dan hilangnya produktifitas. Oleh karena itu, pencegahan stunting sangat penting untuk menjaga kesehatan anak-anak Indonesia dan perkembangan mereka. Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke II adalah salah satu dari 17 tujuan global yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang akan menunjang kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat kedepannya.³⁷ pada sektor kesehatan khususnya gizi di dalam pembangunan berkelanjutan SDGs terdapat pada tujuan poin 2 (zero hunger atau nol kelaparan), tujuan ke 2 SDGs (nol kelaparan memiliki tujuan khusus yaitu menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan Selain itu, terdapat dua target yang diharapkan dapat terwujud pada tujuan 2 SDGs ini karena peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan adalah salah satu dari tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia menduduki angka tertinggi masuk ke 10 urutan tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2022, maka dari itu Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memfokuskan pada kasus stunting untuk menurunkan sesuai perintah Presiden Republik Indonesia

³⁷ BKBN, "Indonesia Cegah Stunting, Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045," kominfo, 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045/0/artikel_gpr. (29/02/24,09:10 WIB)

Tabel 2. 1 Presentase angka Stunting di Pulau Jawa, Indonesia

NO	PROVINSI	2021	2022	2023
1	BANTEN	6,7	6,8	6,8
2	DKI JAKARTA	3,2	1,2	1,2
3	JAWA BARAT	8,3	6,9	6,9
4	JAWA TENGAH	9,0	9,4	9,4
5	DI YOGYAKARTA	10,6	9,2	9,2
6	JAWA TIMUR	10,7	9,5	9,5

Sumber: Kemendagri, <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev>

Berdasarkan gambar presentase di atas menunjukkan angka stunting pada pulau jawa di Indonesia. Jawa timur menduduki angka tertinggi khususnya di daerah Kabupaten Lamongan, memiliki angka stunting yang sangat tinggi, 27,5% pada tahun 2022, naik 7% dibandingkan dengan prevalensi tahun 2021, dan berada di urutan 100 kab/kota prioritas untuk penurunan stunting. Pemerintah pusat berfokus untuk mengurangi stunting di Kabupaten Lamongan. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Lamongan adalah salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat dari perbandingan antara Kabupaten Lamongan dengan wilayah lain telah menggambarkan bahwa Kabupaten Lamongan menempati pravelensi stunting yang tinggi.³⁸

³⁸ USAID, “Mengakselerasi Penurunan Stunting Melalui Kolaborasi Dengan Desa-Desa Di Lamongan,” UNITED STATE AGENCY INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 2022, <https://www.program-erat.or.id/id/mengakselerasi-penurunan-stunting-melalui-kolaborasi-dengan-desa-desa-di-lamongan/>.(29/02/24,10:10 WIB)

Tabel 2. 2 Angka Pravelensi Stunting

Nama Kab/Kota	Angka Pravelensi stunting 2021	Angka Pravelensi stunting 2022	Angka Pravelensi stunting 2023
Kabupaten Lamongan	7,1%	6,2%	5,6%
Kabupaten Bojonegoro	4,6%	5,2%	3,0%

Sumber: Kemendagri, <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev>

Tujuan ini mencakup SDGs Poin II "Tanpa Kelaparan" adalah landasan penting dalam upaya pencegahan stunting. Dengan mencapai tujuan ini merupakan langkah yang tepat untuk kita dapat memastikan semua anak memiliki akses terhadap makanan bergizi dan kehidupan yang sehat, sehingga terhindar dari stunting dan dapat mencapai potensi optimalnya. Selain itu alasan SDGs poin II berperan penting dalam pencegahan stunting adalah mengatasi kekurangan gizi dan kelebihan gizi yang memiliki akibat fatal untuk proses perkembangan anak dan peningkatan resiko terkena stunting, selain itu meningkatkan kesehatan ibu dan anak seperti memberikan layanan edukasi gizi serta imunisasi yang lengkap. Serta mempromosikan pertanian berkelanjutan untuk mendukung produksi pangan yang cukup aman juga memiliki kandungan gizi yang tinggi.³⁹

Stunting, kondisi kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan anak, berhubungan erat dengan poin II SDGs. Indikator utama stunting dari buruknya ketahanan pangan dan rendahnya kualitas gizi, yang secara langsung berkaitan dengan SDGs poin 2 (Mengakhiri Kelaparan, Mencapai

³⁹ Sukolilo, Manyar, and Tjokroaminoto, "Tanpa Kelaparan," *Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)*, 2021, 10–11, https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/AwMsWiKJZhJYp71JaLU3zJxaDKr1GaxErPY4XHNA.pdf.

Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan). Pengurangan stunting juga berkontribusi pada SDGs poin 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), dengan meningkatkan kesehatan dan perkembangan kognitif anak-anak, serta sejalan dengan SDGs poin 1 (Tanpa Kemiskinan) karena keluarga yang memiliki anak stunting sering menghadapi beban ekonomi lebih besar. Penanganan stunting melibatkan pendekatan multi-sektoral yang mencakup intervensi gizi, perbaikan layanan kesehatan, akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, yang bersinggungan dengan berbagai target SDGs lainnya. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi stunting berkontribusi signifikan dalam mencapai berbagai tujuan SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Pelopor utama dari SDGs poin II adalah pemerintah negara dan organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil dan membutuhkan komitmen global. Dimulainya keberadaan SDGs poin II didukung dengan keberlanjutan upaya global yang sudah berlangsung lama dari beberapa dekade untuk mengurangi kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, studi penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa akses terhadap makanan sehat juga bergizi sangat penting untuk kesejahteraan manusia dan sangat penting bagi pencapaian pembangunan jangka panjang, hal ini diadakan pada tahun 2015 dan akan sampai pada tahun 2030. karenanya merupakan peran penting bagi pemerintah, dengan dukungan dari mitra

⁴⁰ Dinda Nathalia Juita et al., “Efektivitas Pencegahan Stunting Melalui Rumah Desa Sehat (RDS),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16734–44, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5190>.

pembangunan seiring dengan komitmen negara-negara untuk mempercepat kemajuan menuju cakupan kesehatan universal.⁴¹

Tanpa kelaparan dalam rangka pencegahan stunting merujuk kepada salah satu dari 17 tujuan global yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang terbangun berkesan. Tujuan ini adalah untuk melawan kelaparan dan malnutrisi karena hal tersebut masih menjadi masalah global yang cukup serius dengan jutaan jiwa di seluruh dunia yang mengalami penderitaan akibat kelaparan, kekurangan gizi serta kelebihan gizi selain itu juga bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan karena hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah kelaparan dan malnutrisi karena orang yang mengalami kekurangan gizi tidak dapat mencapai potensi mereka dalam kesehatan, pendidikan serta produktivitas lainnya.

Hal ini membantu mengurangi ketimpangan dan pembangunan masyarakat yang adil dan setara karena adanya akses terhadap makanan yang bergizi serta kepastian yang layak untuk seluruh rakyat dimanapun tinggalnya agar mendapatkan akses yang sama. Melindungi lingkungan juga sebagai salah satu alasan, karena sistem pangan yang berkelanjutan juga hal terpenting untuk melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim serta mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan juga pengurangan limbah makanan yang akan melestarikan sumber daya alam serta mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun masa depan

⁴¹ B. (Eds.). Shekar, M., & Popkin, *Obesity: Health and Economic Consequences of an Impending Global Challenge*. World Bank Publications., 2020, <https://books.google.co.id/books?id=vvXPDwAAQBAJ&lpg=PT9&ots=JynF1nKWqT&dq=Reducing Poverty%3A A Global Challenge%22 oleh World Bank &lr&hl=id&pg=PT9#v=onepage&q=Reducing Poverty: A Global Challenge%22 oleh World Bank&f=false>.

masyarakat yang lebih baik.⁴² pengurangan kelaparan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak adalah salah satu dari tujuan utama dalam pembangunan keberlanjutan yang berkesan.

Tujuan ini diperoleh dengan mengukur prevalensi stunting sebagai salah satu tanda kualitas gizi anak, mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030, menekan angka penambahan penderita stunting pada usia di bawah lima tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025. Pelopor utama dari SDGs poin II adalah pemerintah negara dan organisasi internasional. Peran pemerintah negara seperti menciptakan kebijakan dan strategi nasional, Pemerintah sepenuhnya berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan nasional yang komprehensif dan strategi untuk mencapai SDGs Point II. Untuk meningkatkan akses kepada makanan, meningkatkan pangan dan gizi ketahanan, dan mempromosikan kelanjutan pertanian, kebijakan ini perlu diimplementasikan secara sangat ketat. Menyalurkan sumber daya untuk program yang mendukung pencapaian SDG Poin II pemerintah harus mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai. Hal ini berfungsi sebagai program untuk meningkatkan produksi pangan dan peningkatan akses udara bersih serta segar.

Pemerintah dapat memberikan inisiatif untuk mendorong sektor swasta dan masyarakat umum untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs Poin II. Membangun tim kolaboratif, Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi internasional, sektor swasta, dan penduduk asli untuk pencapaian SDGs poin II. Organisasi

⁴² food and agriculture organization, "A Sustainable and Food Secure World for All," n.d., <https://www.fao.org/home/en/>.(02/03/24,07:10 WIB)

Internasional memiliki peranan seperti memberikan bantuan keuangan dan teknis Organisasi internasional seperti FAO, UNICEF, dan WFP dapat memberikan bantuan finansial dan teknis kepada negara-negara berkembang untuk mendukung program yang terkait dengan SDGs Poin II. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan organisasi internasional dapat memberikan pengetahuan dan keahlian terbaik untuk membantu negara-negara anggota mencapai SDGs poin II. Meningkatkan kesadaran organisasi internasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya SDGs Poin II dan mobilisasi sumber daya populasi global. Promosi advokasi organisasi internasional dapat mempromosikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pencapaian SDGs Poin II.⁴³

SDGs poin II mulai diadakan pada tahun 2015 dan akan sampai pada tahun 2030. Gizi yang baik adalah dasar untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan pada anak. Anak yang memiliki gizi baik lebih mampu belajar bermain serta lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat mereka juga lebih Tangguh dalam menghadapi penyakit.⁴⁴ Pencegahan stunting terhadap anak bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti dengan memberikan ASI eksklusif untuk bayi sampai dengan berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak serta membawa ke posyandu secara berkala. Mengonsumsi secara rutin Tablet Tambah Darah (TTD). Memberikan MPASI yang memiliki kandungan gizi serta kaya akan protein hewani untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan. Memenuhi kebutuhan gizi

⁴³ SDGs center, “SDGs KNOWLEDGE HUB Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” n.d., <https://sdgs.bappenas.go.id/>.(02/03/24,09:10 WIB)

⁴⁴ unicef, “Nutrition,” n.d., <https://www.unicef.org/nutrition>. (05/03/24,12:10 WIB)

sejak saat hamil. Beri ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Perbaiki permasalahan menyusui. Beri olahan protein hewani pada MPASI (Makanan Pendamping Asi), memantau tumbuh kembang anak, tindakan relatif yang ampuh untuk mencegah stunting terhadap anak adalah dengan selalu memenuhi gizi sejak saat memasuki masa kehamilan, Stunting perlu di beri pencegahan sebab ia dapat memberikan sebab akibat jangka panjang terhadap anak. kondisi stunting dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Tujuan 2 SDGs atau pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pencegahan stunting poin II "Tanpa Kelaparan" (Zero Hunger). Stunting sendiri dikenal dengan kondisi pendek dan sangat pendek pada anak di bawah lima tahun, serta pertumbuhan yang tidak sesuai standar pada usianya yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi pangan kronis. Prevalensi stunting di Indonesia telah menurun, tetapi masih ada disparitas antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberi rekomendasi mengenai kebijakan, investasi dan juga upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi tantangan transformasi sistem pertanian pangan di tengah urbanisasi sebagai pembuka peluang agar dapat memberikan kepastian akan akses pola makan yang sehat juga terjangkau bagi semua rakyat, pemerintah Indonesia juga memperhatikan penanganan masalah gizi lainnya,

seperti tidak cukupnya gizi dan malnutrisi, untuk mencapai tujuan SDGs Tanpa Kelaparan.⁴⁵

2.2 Fenomena Stunting di Kabupaten Lamongan

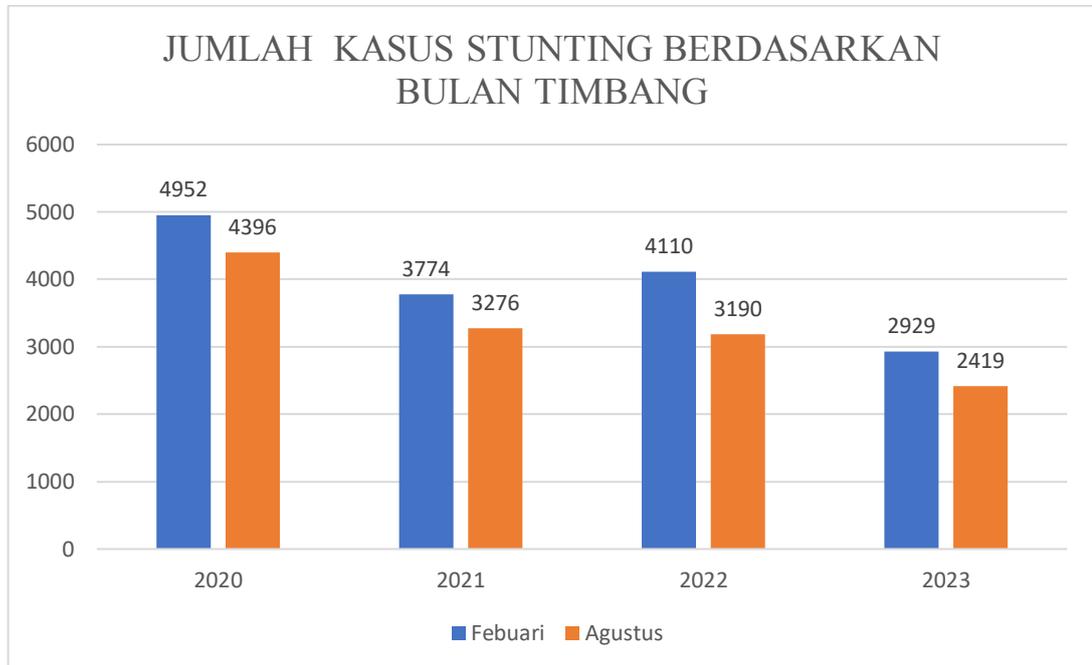
Permasalahan stunting adalah permasalahan kesehatan global. Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Indonesia sebesar 27,7% menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara. Angka ini jauh di atas ambang batas 20% yang ditetapkan oleh WHO, menunjukkan bahwa stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang cukup *urgent* di Indonesia. Masyarakat memiliki peranan penting dalam mencegah kasus stunting dengan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam implementasinya. Menurut data SSGI tahun 2021, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur adalah salah satu dari kelima daerah di Pulau Jawa dengan persentase angka stunting tertinggi. Prevalensi stunting di Lamongan mencapai 28,3%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting dengan menggandeng para pihak, termasuk pemerintah daerah setempat dan organisasi masyarakat, serta masyarakat untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam keberhasilan implementasi kebijakan stunting. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pemerintah setempat dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia, terutama di Kabupaten Lamongan dapat diturunkan secara signifikan.

⁴⁵ WFP and WHO FAO, IFAD, UNICEF, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023, Rome, Italy*; (FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO; 2023), <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc3017en>. (15/03/24,09:10 WIB)

Stunting adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan pertumbuhan linear yang kurang baik pada balita, yang berpotensi meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Dibutuhkan solusi bersama untuk masalah pertumbuhan linear yang kurang baik atau stunting di bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berkomitmen untuk mengurangi stunting melalui berbagai program karena angka stuntingnya masih tergolong tinggi, pada angka 27,5% dari target yang ditetapkan. Beberapa faktor menyebabkan stunting di Kabupaten Lamongan, seperti kekurangan gizi mikro, infeksi, dan konsumsi ASI juga MP-ASI yang tidak sesuai dengan faktor lain, seperti berat badan bayi lahir rendah, pendapatan dari orang tua, dan usia kehamilan, juga menjadi faktor yang mempengaruhi stunting. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah stunting atau balita pendek, tetapi ada banyak faktor pendorong yang menyebabkannya.⁴⁶ Dalam kasus stunting di Kabupaten Lamongan, ada banyak pihak yang berkontribusi pada penurunan stunting. Beberapa di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mana Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi stunting. Mereka telah mencapai target penurunan stunting melalui Program posyandu dengan begitu masyarakat dapat mengetahui kasus stunting yang ada melalui posyandu.

⁴⁶ Norma Cecilia Ezpinoza Juanillo and Alexandra Rupa Huayllapuma, "Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting," 2018, 1–26. <https://repository.unair.ac.id/82064/>

Grafik 2. 1 Grafik Jumlah Kasus Stunting Berdasarkan Bulan Timbangdi Kabupaten Lamongan



Sumber: Bidang PPM, Pemerintah Kabupaten Lamongan

Selain posyandu juga ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan seperti 1-10-100, yang berfokus pada penanganan stunting. Selain itu TP PKK Lamongan, TP PKK bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengencarkan Program 1-10-100, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup balita stunting melalui asupan makanan yang lebih baik. Bupati Lamongan juga tentu memberikan upaya untuk mengurangi stunting di Kabupaten Lamongan diawasi langsung oleh Yuhronur Efendi, Bupati Lamongan. Ia telah memberikan bantuan paket 1-10-100 secara simbolis kepada penerima manfaat yang berfokus pada balita dari keluarga yang kurang sejahtera. Ketua TP PKK Lamongan Anis Yes, sebagai Ketua TP PKK Lamongan, telah berpartisipasi dalam peluncuran Program 1-10-100 dan memberikan bantuan paket

1-10-100 kepada penerima manfaat. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, dalam upaya penurunan stunting, pendidikan dan pelayanan kesehatan sangat penting. Program-program seperti edukasi pada orang tua dan remaja dan peningkatan layanan kesehatan telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan layanan kesehatan yang lebih baik.⁴⁷

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kabupaten Lamongan harus mencapai target penurunan stunting sebesar 12,3% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mencapai tujuan mereka. Sejak beberapa tahun terakhir, masalah stunting di Kabupaten Lamongan telah menjadi perhatian publik. Angka stunting di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 mencapai 27,05 persen, atau 2.900 kasus. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi angka stunting. Salah satunya adalah Program 1-10-100, yang dimulai pada tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup balita stunting melalui peningkatan asupan makanan mereka. Selain itu, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan Program unggulan 1-10-100, dengan TP PKK Lamongan (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).⁴⁸

⁴⁷ JDIH BPK, “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI,” 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114046/perbup-kab-lamongan-no-7-tahun-2019>. (20/03/24,15:10 WIB)

⁴⁸ Aditya Sindu Sakti et al., “Edukasi Dan Sosialisasi Tentang Pentingnya Mencegah Stunting Pada Anak Di Satuan PAUD Sejenis (SPS) Melati Putih Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,” *Ahmad Dahlan Mengabdi* 2, no. 1 (2023): 15–19, <https://doi.org/10.58906/abadi.v2i1.89>.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya stunting di Kabupaten Lamongan, seperti Pendidikan Orang Tua sebagian besar kasus stunting di Kabupaten Lamongan terjadi pada balita yang memiliki ayah dan ibu yang tidak terdidik. Ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua sangat penting untuk memantau kesehatan anak. Kurangnya Pengetahuan hal yang menarik untuk dibahas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan stunting dan peningkatan status gizi anak melalui olahan pangan. Kurangnya Akses Kesehatan Stunting sudah menjadi masalah umum di masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk meningkatkan status gizi anak, terutama balita, dan mengurangi prevalensi stunting, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan manfaat dengan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan bahan lokal untuk membuat makanan olahan yang sehat dan bergizi.

Kurangnya Pengetahuan tentang Pemanfaatan Bahan Lokal peserta penyuluhan dan pelatihan tidak hanya tidak memahami masalah status gizi dan stunting, tetapi juga tidak tahu manfaat dari bahan lokal di sekitar mereka. Salah satunya adalah mengolah daun kelor yang tinggi protein.⁴⁹ Stunting adalah masalah yang kompleks dengan banyak aspek. Dibutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi stunting di Kabupaten Lamongan. Selain membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, kebijakan dan program pemerintah, bersama dengan upaya komunitas dan organisasi, dapat

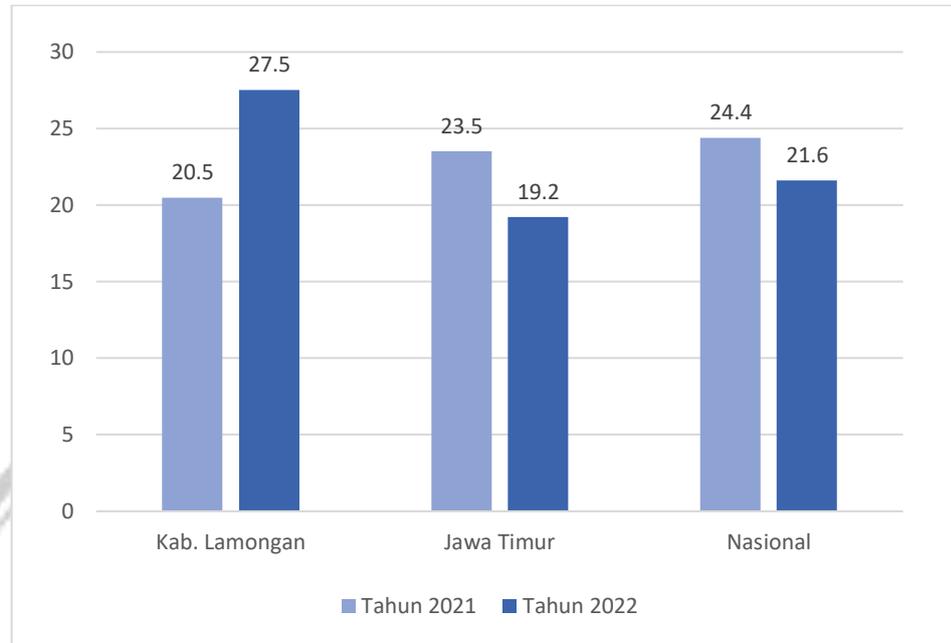
⁴⁹ Wiharyanti Nur Lailiyah et al., "Pelatihan Pembuatan Nugget Ikan Dalam Rangka Pencegahan Stunting Di Desa Gintungan Lamongan," *DedikasiMU: Journal of Community Service* 5, no. 2 (2023): 143, <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v5i2.5669>.

memainkan peran penting dalam menurunkan angka stunting. Namun, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi dari standar WHO.⁵⁰

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah stunting, seperti meningkatkan cakupan ASI eksklusif dan memberikan MP-ASI yang tepat kepada ibu. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dan masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai target nasional penurunan stunting pada tahun 2024. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mencegah stunting. Stunting dapat berdampak negatif pada pertumbuhan anak, seperti keterlambatan pertumbuhan fisik dan kognitif, serta peningkatan risiko penyakit jangka panjang di masa depan. Dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia, masalah stunting masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, menurun dari 24,4% pada tahun 2021. Meski demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki angka prevalensi stunting di atas. Berikut adalah gambaran grafik kasus stunting:

⁵⁰ “To Find out If the Correlation Value Obtained Valid or Not. The Numbers of Sample Use in This Study Are 26 People with a Level of 30,” n.d., 30–45. (10/04/24,10:10 WIB)

Grafik 2. 2 Gambar grafik kasus stunting



sumber: Bidang PPM Bapeda Kabupaten Lamongan

Dari gambar grafik di atas dapat diartikan bahwa stunting di Jawa Timur masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Termasuk yang ada pada Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyadari pentingnya menangani stunting dan telah mengambil langkah-langkah strategis melalui berbagai upaya pencegahan, antara lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar grafik, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih ada perbedaan antara realisasi angka stunting di Jawa Timur dan target nasional.

Untuk mencapai target penurunan angka stunting dan menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Penanganan Stunting pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah stunting, termasuk pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK membantu keluarga dengan risiko stunting dengan mengajarkan mereka tentang pola asuh, sanitasi, dan gizi, serta membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan program pelindung anak. Program yang disebut Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) Germas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk mencegah penyakit. Berbagai inisiatif dilakukan oleh Pemkab Lamongan dalam program ini, termasuk penyuluhan kesehatan, senam bersama, dan posyandu.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita yang rentan terhadap stunting diberikan PMT oleh Pemkab Lamongan. Makanan PMT ini penuh dengan vitamin, mineral, dan protein. Fortifikasi Pangan Pemkab Lamongan melakukan fortifikasi pangan, yang berarti mengisi makanan pokok dengan zat gizi mikro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama mereka yang hamil dan menyusui. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Pemkab Lamongan memperluas layanan kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Ini dicapai dengan mendirikan puskesmas dan posyandu di wilayah terpencil dan menyediakan tenaga medis yang berpengalaman. Edukasi Gizi dari Pemkab

Lamongan memberikan pelatihan gizi kepada warganya, khususnya ibu hamil dan bayi baru lahir. Pendidikan ini diberikan melalui berbagai media.⁵¹

2.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Pencegahan Permasalahan Stunting

Keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi disebut kebijakan publik. Kebijakan publik mencakup tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa aturan, keputusan, atau strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencegah stunting diusulkan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Beliau menyatakan bahwa stunting melibatkan penundaan pertumbuhan anak dan perkembangan otak yang kurang optimal. Selain itu beliau menekankan bahwa untuk mencegah stunting, upaya holistik, integratif, dan berkualitas harus dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama semua sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan. Setelah berusia dua tahun, stunting pada balita dapat dilihat dengan jelas. *World Health Organization* (2013) juga menyatakan bahwa stunting meningkatkan risiko kematian dan kemunculan berbagai penyakit pada bayi dan balita. Ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan motorik, yang berdampak pada kesehatan, dan risiko lambatnya perkembangan kognitif, yang berdampak pada kecerdasan anak.⁵²

⁵¹ kemenkes direktorat jendral pelayanan kesehatan, "Mengenal Apa Itu Stunting...", 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting. (15/04/24,11:10 WIB)

⁵² pemkab Lamongan, "Rumah Layanan Pemerintah Kabupaten Lamongan," n.d., <https://lamongankab.go.id/>. (25/04/24,14:10 WIB)

PBB telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang turut berkomitmen dalam pencapaian SDGs.⁵³ Banyak kebijakan dan program yang dicanangkan untuk mewujudkan komitmen ini, dengan penekanan khusus pada beberapa poin SDGs yang dianggap penting bagi Kabupaten Lamongan. Poin II SDGs: Tanpa Kelaparan Program Pangan Murah yang menyediakan masyarakat kurang mampu dengan bahan pangan pokok yang murah, Pemberdayaan Petani dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, Pengembangan Infrastruktur Pertanian dengan membangun sistem irigasi, jalan usaha tani, dan lumbung desa untuk mendukung distribusi hasil panen yang lancar. Peningkatan Gizi Masyarakat melakukan program yang mengajarkan nutrisi dan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak dan ibu hamil. Karena stunting adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, perlu ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencegahnya.

Perkembangan fisik anak tidak hanya terkait dengan stunting, tetapi juga perkembangan otak dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif harus mencakup banyak bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Ini juga memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan kebijakan pencegahan stunting pemerintah

⁵³ Sika Indonesia, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB," n.d., <https://idn.sika.com/in/about-us/sustainability/sika-sustainability-strategy/un-sustainable-development-goals.html>. (02/05/24,09:25 WIB)

Kabupaten Lamongan adalah untuk mencapai tingkat stunting nol di wilayah setempat. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk 1.038 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 3.108 orang, serta meluncurkan program inovasi Ferrameg yang berfokus pada pengurangan anemia dan stunting melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) secara teratur dan peningkatan kesadaran orang tua dan remaja putri.⁵⁴ Analisis lingkungan kebijakan juga mendukung kebijakan ini. Analisis ini melihat konteks implementasi kebijakan, yang mencakup karakteristik lembaga dan penguasa, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kebijakan pencegahan stunting yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan akan memiliki hasil yang lebih baik dan berkelanjutan dalam mengurangi tingkat stunting di wilayah tersebut.

Gambar 2. 1 Peluncuran program Ferrameg secara simbolis oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dengan melepaskan balon, di SMPN 2 Lamongan, Senin (19/6/2023)



⁵⁴ Dinas Kominfo Provinsi Jatim, “Cegah Stunting, Lamongan Luncurkan Ferrameg,” 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/cegah-stunting-lamongan-luncurkan-ferrameg>. (05/05/24,12:25 WIB)

(Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Alasan Pemerintah Kabupaten Lamongan Menerapkan SDGs adalah karena hal ini tujuan global yang disepakati oleh semua negara, termasuk Indonesia. Kabupaten Lamongan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global dengan menerapkan SDGs. Visi dan misi Kabupaten Lamongan adalah "Menjadikan Kabupaten Lamongan yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan." SDGs sesuai dengan visi tersebut. Misi Kabupaten Lamongan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan melestarikan lingkungan. SDGs memiliki potensi untuk membantu Kabupaten Lamongan mengatasi berbagai kendala pembangunan yang dihadapinya. SDGs dapat membantu Kabupaten Lamongan mengatasi masalah pembangunan seperti kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial.⁵⁵

SDGs dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. SDGs tidak hanya dapat dicapai oleh pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan SDGs, Kabupaten Lamongan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membuat mereka merasa memiliki program pembangunan. Dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program, pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk mencapai SDGs. SDGs dapat membantu Kabupaten Lamongan mengatasi tantangan pembangunan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. SDGs menjadi potensi besar bagi Kabupaten Lamongan untuk mengatasi beberapa macam tantangan pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan di bantu dengan

⁵⁵ pemkab Lamongan, "Rumah Layanan Pemerintah Kabupaten Lamongan." (10/05/24,14:30 WIB)

komitmen serta konsistensi dari berbagai pihak SDGs dapat diwujudkan dan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.⁵⁶

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan. Stunting dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak, seperti keterlambatan pertumbuhan fisik dan kognitif, serta meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyadari pentingnya menangani stunting dan telah mengambil langkah-langkah strategis melalui berbagai kebijakan publik. Kebijakan publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat, (Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah yang mana hal ini dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada pada masyarakat). Setiap kebijakan publik memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan harus selaras dengan nilai yang berlaku pada masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai yang mendasari kebijakan publik pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan adalah kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, komitmen terhadap masa depan anak-anak, dan upaya untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Baik berupa tindakan langsung atau tidak langsung, kebijakan publik dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan publik terdiri dari elemen penting seperti input, tujuan, perangkat, dan dampak. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-

⁵⁶ UNDP INDONESIA, "RESILIENT INDONESIA Working Towards a More Inclusive, Sustainable Future," n.d., <https://www.undp.org/indonesia>. (16/05/24,11:30 WIB)

masalah masyarakat Ketika kebijakan publik dibentuk maka di situlah pemerintah mengimplementasikan nilai-nilai terhadap masyarakat, karena setiap kebijakan public memiliki nilai di dalamnya maka kebijakan publik harus selaras dengan nilai yang berlaku pada masyarakat.⁵⁷

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil beberapa langkah strategis untuk menghentikan stunting. Program "1-10-100", yang diluncurkan pada 29 Agustus 2023, adalah contohnya. Intervensi 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar, dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) adalah fokus utama program ini. Selain itu, program ini melibatkan penanganan stunting secara kuratif dengan mengidentifikasi kasus stunting melalui data bulan timbang dan penanganan preventif, yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan. Selain itu, dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah serempat, Pemkab Lamongan telah membentuk 1.038 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan anggota 3.108 orang. Selain itu, program inovasi Ferrameg (Fe Friday Calling) diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan konsistensi remaja perempuan tentang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Pemkab Lamongan telah mengembangkan program tambahan untuk mengurangi stunting, seperti Program Peduli Gizi Balita (Pelita LA), yang membantu ibu hamil dan balita mendapatkan makanan tambahan yang baik. Analisis lingkungan kebijakan mendukung program ini karena melihat konteks implementasi kebijakan, yang

⁵⁷ Nur Handayani, Dede Risa Nurmayanti, and Riant Nugroho, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 32–40, <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1564>.

mencakup karakteristik lembaga dan penguasa, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting.⁵⁸



⁵⁸ Farin Reggie, "Lamongan Berhasil Tekan Angka Stunting Melebihi Target BKKBN," RRI.co.id, 2024, <https://rri.co.id/index.php/daerah/657197/lamongan-berhasil-tekan-angka-stunting-melebihi-target-bkkbn>. (22/05/24,08:30 WIB)